



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, DJSN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : I
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Kamis, 8 September 2011
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Acara : Membahas perkembangan Program Transmigrasi.
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran : 38 orang dari 47 anggota Komisi IX DPR RI
3 orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 10.25 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

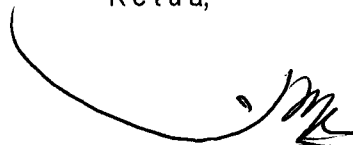
1. Setelah mendengar penjelasan dari Kemenakertrans RI berkaitan dengan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Transmigrasi, maka untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman dan mekanisme pembahasan anggaran sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif terutama dalam upaya memperoleh anggaran tambahan dari sektor manapun yang berkaitan dengan program Kemenakertrans RI.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk meningkatkan pengawasan internal dan mendorong berlangsungnya *good governance* untuk meningkatkan kinerja Kemenakertrans RI. Komisi IX DPR RI meminta kepada aparat penegak hukum untuk

mengusut tuntas kasus keterlibatan 2 (dua) orang pejabat Kemenakertrans RI dan pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat dalam kasus tersebut.

3. Komisi IX DPR RI akan melanjutkan Panja Transmigrasi untuk lebih melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap program transmigrasi.
4. Komisi IX DPR RI akan membentuk Panja Konsorsium Asuransi TKI.
5. Komisi IX DPR RI dapat menyetujui tambahan Anggaran Kemenakertrans RI pada APBNP 2011 dalam Rapat Kerja tanggal 11 Juli 2011, dengan alokasi anggaran sebagai berikut:
 - Dana Optimalisasi sebesar Rp. 250.600.000.000.00
 - Dana Pendidikan sebesar Rp. 270.000.000.000.00
 - Dana Penghargaan (*reward*) Rp.7.549.591.000.00

Rapat diakhiri pukul 15.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Ketua,



dr. RIBKA TJIPTANING